

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena Gerakan kerelawanan menjadi telaah yang kini mempengaruhi kondisi demokrasi di Indonesia. Semangat gerakan itu menguap sebagai timbal balik terhadap keresahan publik terhadap perilaku elite politik yang kian menyimpang dari cita-cita reformasi pasca masa otoritarianisme selesai. Keberadaan ruang public serta dominasi kekuasaan terhadap publik pada pilihan demokrasi sebagai sistem politik justru diterjang oleh kepetingan para oligarki dan predator politik. Publik pun melihat pemilu dan partai politik sebagai arus penting terjadi kondisi politik sekarang ini. Proses demokrasi yang dijalankan secara prosedural dan legal formal justru kian menciptakan adanya ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat

Berdasarkan Diamond (2003:93) proses demokrasi yang dialami di negara-negara dunia ke-tiga mengalami permasalahan yang secara spesifik terjadi secara alamiah. Terdapat beberapa kategori yang harus diaplikasikan agar demokrasi terselenggara dengan baik di negara yang menganut ; (1) Penguatan demokrasi, (2) Kelembagaan politik, (3) Kinerja rezim. Implikasi social yang terjadi dalam penekanan ketiga bidang tersebut dapat diperjuangkan secara Bersama atau individu, bahkan ada yang saling kontra-diksi satu dengan lainnya. Keadaan seperti ini akan wajar terjadi pada negara demokrasi baru yang baru berkembang dimana terdapat Batasan dalam memiliki hak berpendapat. Konflik-konflik akan cepat terjadi dimana keadaannya akan cepat selesai dan terjadi kembali yang bergantung pada iklim politik dan kondisi ekonomi yang melingkupinya.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat sipil atau *civil society* sangat diperhitungkan. Demokrasi menjadi substansi yang penting dalam

politik kontemporer di seluruh penjuru dunia. Penekanan dan pendekatan yang diterapkan dalam terselenggaranya demokrasi pada prosesnya terdapat masalah-masalah yang timbul secara alamiah. Permasalahan yang timbul dalam demokrasi dapat terkategori sebagai masalah *civilian supremacy upon military* tingkatan modernisasi demokrasi, pilihan strategi demokrasi, Lembaga-lembaga demokrasi dan lain sebagainya.

Tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang atau demokrasi baru dengan voluntarisme adalah kesiapan serta pengalaman. Menurut Jati (2016) setidaknya ada 3 konsekuensi komparasi dengan negara barat yang lebih dulu menerapkan sistem demokrasi. **Pertama**, negara demokrasi baru belum memiliki *grassroot* sosial demokrasi yang kokoh, masih dengan patrimonial yang kuat. **Kedua**, paradigma kerelawanan yang berkembang tidak merujuk pada institusionalisme politik, tetapi kepada respon emosional publik terhadap kondisi politik. **Ketiga**, keberlanjutan Gerakan kerelawanan yang nihil, dari sebuah kelompok sebatas partisipan kemudian masuk ke dalam ranah elit.

Tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa, voluntarisme dipandang sebagai gerakan keikutsertaan dalam politik yang mendorong realitas perubahan sosial politik melalui tahapan politik ekstra parliamenteranisme. Setiap bidang memiliki orientasi pribadi untuk mengamini revolusi tersebut, apakah dalam arti merebut kekuasaan, mempertahankan status quo terhadap sistem yang ada, atau hanya sekedar memperbaiki sistem ada (Jati, 2016). Oleh karena itulah diperlukan adanya entitas yang dikonstruksikan untuk hal yang perlu diperbaiki oleh masyarakat strata menengah. Kasus voluntarisme di negara baru menempatkan masalah publik dan representasi kepentingan menjadi indikator penting memicu gerakan sukarelawan politik.

Sementara di kalangan negara demokrasi baru, pengalaman kekerasan dan marginalisasi menjadi simbol penting terjadinya gerakan voluntarisme politik.

Kerelawanan secara sederhana dipahami sebagai sikap sukarelawan atau kerja sosial. Secara definitif kerelawanan politik adalah kerja politik yang berdimensi altruistik dan filantropis berorientasikan pada perubahan sosial-politik. Dua dimensi norma dalam kerelawanan tersebut mengindikasikan adanya budaya kewargaan yang kuat (*civic culture*) terhadap ruang publik.

Bergeser ke masa reformasi, Menurut Muhammad AS. Hikam (1999), pada tingkat wilayah maupun pusat setidaknya terdapat 1.000 CSO yang berkembang dan menjamur di Indonesia. Jenis dan bentuknya bermacam-macam, merujuk pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi dalam bidang keagamaan, media publik (cetak dan elektronik), organisasi kebudayaan, dan bidang lain sejenis. Secara umum instansi memiliki visi/misi, titik tujuan dan ideologi dalam perbedaan antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, kemunculannya dengan cara geraknya, Gerakan kerelawanan tersebut bisa diasumsikan ke dalam dua kelompok, yaitu: gerakan civil society di satu sisi; dan, organisasi civil society di sisi yang lainnya. Kultur serta budaya di Indonesia yang bermacam-macam melahirkan karakter yang khas pada CSO yang ada meskipun dari awal reformasi hadirnya CSO masih banyak mengadopsi dari barat. Seperti yang telah dipaparkan tentang pengertian, tipologi, kategori dari Civil Society Organizations diantaranya adalah dalam bentuk Non-Governmental Organizations (NGO's) dan Community Based Organizations (CBO's).

Proses keberadaan LSM di Indonesia sempat terjadi pergolakan di masa rezim orde baru ke masa reformasi. Di masa orde baru, LSM seakan dibawah "otoriter kekuasaan" kepemimpinan masa itu. Implikasi pada gaya kepemimpinan orde baru, menyebabkan ketidakleluasaan kebijakan serta tindakan Gerakan kerelawanan pun

seakan “disetir” oleh rezim. Kehadiran dan berkembangnya pada saat itu diindikasikan demi kepentingan pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pengejawentahan wadah masyarakat ini terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization*, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dan *Community Based Organization* (CBO)

Dalam perkembangan dunia modern, konsep *civil society* dihubungkan dengan konsep *governance*. *Governance* juga bisa diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik (Sumarto, 2004). Di dalam *governance* sendiri terdapat 3 (tiga) aktor yang sangat berperan didalam dinamika *governance* sendiri, aktor tersebut adalah negara, pasar dan *civil society*. Pengertian negara adalah organisasi yang memiliki legitimasi dan memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak rakyatnya. Pengertian pasar dalam lingkup *governance* adalah sebuah sistem sosial, dimana didalamnya individu-individu mengejar kemakmuran masing-masing dengan saling mempertukarkan barang/jasa bilamana pertukaran itu dianggap menguntungkan oleh masing-masing individu yang terlibat.

Saat ini seiring dengan semakin terbukanya proses demokratisasi dimana semua bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya secara gamblang berpartisipasi dalam ranah kehidupan bernegara. Kebebasan yang dibawa oleh sistem demokrasi membawa angin segar dalam berhimpun. Semangat partisipasi dalam berkehidupan negara ini tak lepas dari sisi sejarah perjuangan Boedi Oetomo di tahun 1908 ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh sebagian pemuda (Kompas, 28 Oktober 2019). Di masa pendudukan Jepang, adanya Gerakan kerelawanan di prakarsai

oleh propaganda Jepang (Kompas, 28 Oktober 2019). Pasca kemerdekaan hingga sebelum tahun 1965, gerakan kerelawanan tumbuh dengan basis perjuangan politik ideologis (Kompas, 20 Mei 2019). Gerakan kerelawanan politik dalam berbagai bentuk terus digerakkan baik di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan sebagai bagian dari upaya mendorong infrastruktur demokrasi (Kompas, 17 April 2019).

Keberadaan Gerakan kerelawanan ditengah masyarakat hari ini memegang peran penting guna menyeimbang antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Dalam realitasnya, tidak sedikit masyarakat yang masih berpikiran bahwa LSM merupakan singkatan dari “Lembaga Suka Memeras” yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan keberpihakannya yang harusnya netral (Kompasiana.com, 23 April 2011).

Dalam perspektif Gerakan, landasan bergerak wajib memiliki isu yang menjadi focus. Isu yang berkembang deras di Indonesia pada akhir ini adalah pada kontestasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Berkembangnya demokrasi di Indonesia melahirkan sistem pemilihan baik Presiden sampai dengan Kepala Daerah secara langsung. Pemilu yang mencerminkan kehendak-rakyat yang genuine, yang asli dan bonafid adalah pemilu yang mensyaratkan adanya proses pemilihan umum yang menjamin tidak adanya distorsi terhadap kehendak rakyat.

Proses lahirnya sistem pemilu pasca reformasi melahirkan LSM di Indonesia yang bergerak untuk memberikan Pendidikan demokrasi dan politik seperti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) serta Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) merupakan perkembangan baik bagi situasi pemilu di Indonesia. Hadirnya NGO dalam membidangi isu Demokrasi dan Pemilu merupakan salah satu bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Kewarganegaraan dalam Bahasa Latin disebut

“CIVIS” selanjutnya dari kata “CIVIS” dalam bahasa Inggris disebut “Civic” artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic ini lahir kata Civics Ilmu kewarganegaraan, Civic Education dan Pendidikan Kewarganegaraan (Darmadi,2010:7).

Keberadaan Gerakan kerelawanan ditengah masyarakat hari ini memegang peran penting guna menyeimbang antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Dalam realitasnya, tidak sedikit masyarakat yang masih berpikiran bahwa LSM merupakan singkatan dari “Lembaga Suka Memeras” yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan keberpihakannya yang harusnya netral (Kompas.com, 30 Juli 2012). Aktivitas LSM yang berpihak juga terkadang dimanfaatkan demi kepentingan politik, menjual belikan ideologinya untuk keberlangsungan hidup. Alhasil, Hal ini disebabkan karena dana dan aktivitas sangat bergantung pada pemerintah. Mereka pada level yang lebih ekstrim dapat menjadi bayang-bayang pemerintah yang akan menjadi tembok pertahanan terhadap LSM atau organisasi lain yang kritis terhadap kebijakan pemerintah (Kompas.com, 30 Juli 2012). Namun, ada fenomena baru dalam LSM di Indonesia, yang bergerak dan diinisiasi oleh anak muda, yaitu KISP. KISP hadir dan diinisiasi dari beberapa kalangan anak muda yang tergerak semangatnya untuk mengajak teman-temannya pada awalnya untuk mengenal lebih tentang pemilu. Kelompok ini mencoba memberikan Pendidikan pemilu dan politik yang terfokus untuk generasi muda kemudian.

Posisi CSO dalam masyarakat menjadi alternative jawaban dalam demokrasi yang rapuh. Pemilu yang merupakan hasil dari demokrasi merupakan proses awal terselenggaranya roda pemerintah yang juga sebagai penentu kondisi sosial masyarakat. Independensi serta kemandirian LSM seperti KISP merupakan angin segar yang baik untuk Pendidikan pemilih di masyarakat.

Penelitian ini focus membahas tentang bagaimana kerelawanan KISP hadir sebagai mitra ditengah-tengah masyarakat dan pemerintah dalam memberikan Pendidikan pemilih di Provinsi DIY. Ada beberapa elemen anak muda yang ada di dalam KISP. Dari unsur ada IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IPNU (Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) , Pemuda Muhammadiyah, dan berbagai Mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi DIY. Latar belakang beberapa Lembaga yang berbeda ideologi tidaklah menjadi hambatan para anggota anak muda ini untuk terus menciptakan suasana baik dalam bergerak.

Pendidikan pemilih dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/pemilihan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah.

Pendidikan pemilih dengan demikian dimaknai dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu serta demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memiliki hak suara. Dalam Pendidikan pemilih, didalamnya mencakup pemberian informasi kepiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi.

Kegiatan serta ranah gerak KISP sendiri baru berpusat di Provinsi DIY. Fokus yang menjadi arah gerak dalam berkegiatan memilih anak muda dan pemilih pemula dalam memberikan meningkatkan partisipasi pemilu (KabarKota, 2 April 2019). KISP hadir memberikan alternative LSM yang memberikan Pendidikan pemilu serta demokrasi yang Independen dan tidak terikat oleh partai politik dan instansi pemerintah manapun.

KISP berdiri dan bekerja sejak tahun 2018. Kala itu, KISP berangkat dari sejumlah anak muda yang ada di Kota Yogyakarta yang resah akan rekan-rekannya yang masih tersesat dan tidak tau tentang politik serta pemilu. Berangkat dari nongkrong dan diskusi angkringan, beberapa orang anak muda mencoba membicarakan dan menginisiasi Gerakan diskusi politik yang ringan dan mudah dipahami oleh kalangan anak muda.

Beberapa kegiatan diinisiasi dan digerakkan secara swadaya dan mandiri sampai saat ini, seperti sebagai pemantau pemilu pada prosesi Pemilu Serentak 2019, agenda Training Politik yang menasar anak muda, pembentukan Desa Anti Politik Uang Sardonharjo Sleman, membuat Podcast terkait politik dan demokrasi dan diskusi-diskusi di café serta kedai santai.

Dalam rentan waktu 1 tahun, KISP terus melakukan Pendidikan pemilih dan memantau segala tahapan pemilu, mulai dari pra-pemilihan, hari pemilihan, hingga pasca pemilihan. Dalam menggerakkan mesinnya, KISP juga membuat berbagai *merchandise* kekinian seperti tas, gantungan kunci, pin, kaos, hingga penerbitan buku *millennial voters* sebagai *fund raising*. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar KISP tidak bergantung pada siapapun dalam anggaran. Meskipun beberapa elemen yang ada di dalam anggota KISP berbeda-beda, mereka tetap mengedepankan independensi dan bergerak secara kerelawanan untuk melakukan Pendidikan pemilih.

Bergerak dalam riset dan ilmiah, KISP juga telah melakukan penelitian yang menasar anak muda dalam keterlibatannya atau partisipasinya dalam pemilu. Hal ini dilakukan mengingat partisipasi anak muda hari ini sangat rendah dari jumlah nya yang sangat besar. Dalam risetnya, KISP menentukan 400 responden anak muda yang tidak tertarik dengan pemilu karena prosesnya banyak ditemukan indikasi praktik kotor para oknum politisi dan partai politik.

KISP terus melakukan Pendidikan pemilih anak muda. Dalam jargonnya, KISP memiliki semangat yang tertuang dalam “Yang Muda Yang Bergerak”. Keresahan yang dirasakan oleh KISP adalah permasalahan yang tak kunjung usai selama demokrasi tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Sejak resmi berdiri pada tahun 2018, KISP telah konsisten membuat agenda dan kegiatan terkait Pendidikan pemilih di berbagai wilayah di Provinsi DIY. Keberadaan CSO kepemiluan yang ada di Indonesia harus menguatkan ideologisasinya agar arah gerak dan keberpihakannya baik. KISP dengan kemandirian dan keterlibatannya dalam proses demokrasi menarik untuk dibahas dengan berbagai agenda yang dibuat, prestasi yang didapat dan sumber pendanaan mandiri yang digunakan berhasil untuk mewarnai pemilu dan demokrasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan cakupan luas latar belakang yang sudah dibahas diatas, maka muncul perumusan masalah dan kepentingan persoalan sebagai berikut: Bagaimana pola Gerakan Kerelawanan Komite Independen Sadar Pemilu dalam melakukan Pendidikan pemilih di Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan dicapai dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pola gerakan Komite Independen Sadar Pemilu dalam melakukan Pendidikan pemilih di Provinsi DIY
2. Mengetahui program Komite Independen Sadar Pemilu dalam melakukan Pendidikan pemilih di Provinsi DIY

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan diatas, secara komprehensif penelitian ini mempunyai manfaat dari segi teoritis maupun praktis informasi terkait Pendidikan pemilih secara efektif dan efisien. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoritis

Dalam segi teoritis akhir penelitian ini semoga dapat berguna sebagai tolak ukur bagaimana dalam negara masyarakat dapat saling memberikan dalam ilmu social dan politik terkait Pendidikan pemilih. Program Pendidikan pemilih yang efektif dan efisien juga perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya dengan kajian serta penelitian yang lebih mendalam dengan harapan penelitian ini bias menjadi salah satu referensi.

2. Praktis

1. Memberikan informasi dan data kepada masyarakat, organisasi masyarakat sipil, Lembaga kepemiluan dan partai politik terkait Pendidikan pemilih.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta bahan informasi bagi peneliti yang akan meneliti lebih dalam terkait pola Pendidikan pemilih.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian serta karya penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Skripsi pada tahun 2018 oleh Syahrul Fathullah peneliti dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, “ Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan terhadap Pemantauan Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros” penelitian ini menganalisis tentang peran peran masyarakat dalam melakukan pemantauan dana

kampanye yang digunakan para calon peserta pemilu pada pemilihan kepala daerah serentak .

Penelitian tersebut menggunakan sampel pada pilkada di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Dalam melaksanakan kegiatan, JPPR melakukan 2 fokus kegiatan, yakni melakukan sosialisasi terkait pentingnya berpartisipasi serta melakukan pemantauan pada dana kampanye. Pada presentase akhir, ada peningkatan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan sehingga bias dikatakan ada dampak yang diberikan oleh JPPR terhadap program yang dijalankan.

2. Penelitian pada tahun 2018 oleh Sunarso, mahasiswa dari Program Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta “Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih” yang membahas tentang bagaimana di Madura seorang Kiai di tokohkan dan diagungkan oleh santri digunakan sebagai patron politik masyarakat.

Penelitian tersebut menggambarkan Kiai yang bisa dikatakan sebagai *civil society* yang mempunyai *power* untuk menentukan pandangan politik para santri di wilayahnya. Selain itu, Kiai juga bias diposisikan layaknya LSM, sebagai penengah konflik, mediator politik, dan lainnya.

3. Penelitian pada tahun 2017 oleh Argenti, mahasiswa dari Universitas Singaperbangsa Karawang “Civil Society dan Muhammadiyah” mengkaji bagaimana organisasi Muhammadiyah secara lahirnya merupakan organisasi keagamaan yang bergerak berlandaskan dakwah Pendidikan bukanlah organisasi politik. Meski begitu, Muhammadiyah juga tak lepas dari politik. Persinggungan Muhammadiyah dengan politik bukan hal baru, warga Muhammadiyah pun wajib mengambil peran dan tidak boleh apatis dalam politik dengan tertuang dalam buku pedoman warga Muhammadiyah.

Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana Muhammadiyah menerapkan sistem *high politics* dalam kehidupan bernegara. Peran *civil society* Muhammadiyah juga dibuktikan dengan amal usaha serta semangat lainnya dalam membangun Muhammadiyah yang lebih baik.

4. Yuhdi dan Muffaruddin (2015) dalam laporan hasil penelitian KPU Kabupaten Aceh Barat yang berjudul *Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat*, menjelaskan bahwa *political voluntarism* tidak muncul dan berkembang pada masyarakat Aceh Barat, hal ini dikarenakan masyarakatnya yang digerakkan oleh uang (48,9%) untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik dan masyarakat tidak ingin terlibat dan tidak menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik (54,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa *Political voluntarism* hanya memberikan kontribusi sebesar 27 persen ($R^2 = 0.272$) terhadap partisipasi politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat literasi politik, pendidikan politik, sosialisasi politik, dan informasi politik.

5. Penelitian pada tahun 2016 oleh Syarifuddin, mahasiswa Jurusan Sosiologi Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar “*Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani?*” penelitian ini membahas tentang kepribadian Muhammadiyah sebagai salah satu bentuk *civil society* yang berkemajuan. Kader serta warga Muhammadiyah mempunyai posisi yang seimbang dan saling merangkul menguatkan dalam kehidupan bernegara.

Penelitian tersebut harusnya mengkaji lebih dalam bagaimana Muhammadiyah saat ini berjalan, masih terlalu banyak menceritakan masa lalu yang kiranya sudah bertolak belakang dengan keberadaannya sekarang.

6. Skripsi pada tahun 2018 karya Pudana Faqih, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta “Peran gerakan pemuda ka’bah dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda kecamatan gondomanan kota Yogyakarta” tulisan ini membahas tentang salah satu organisasi masyarakat di Yogyakarta yang mempunyai dedikasi tersendiri terhadap Pendidikan politik. Pergerakan yang dibangun atas inisiasi kalangan anak muda yang resah akan kondisi politik menyerukan Pendidikan politik bagi anak muda lainnya. Penelitian ini terbatas pada satu paradigma bahwa Pendidikan politik dilakukan pada momen tertentu saja, tidak dilakukan berjenjang. Masih ada kepentingan dibalik adanya Pendidikan politik yang dilakukan, secara kasarnya, belum secara sukarela.
7. Penelitian pada tahun 2014 oleh Bambang Arianto, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik “ Fenomena relawan politik dalam kontestasi presidensial 2014” mengkaji tentang Gerakan non-partisan atau relawan yang muncul sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Berbagai model perpolitikan muncul voluntarisme. Penelitian ini sebatas membahas relawan tanpa identitas sehingga tidak diketahui secara lanjut pola seperti apa yang digunakan
8. Penelitian pada tahun 2015 oleh Sayekti Dwi Purboningsih, jurnal review politik “Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik dalam Pilpres 2014 di Surabaya” penelitian ini mengkaji tentang klasifikasi Gerakan sosial baru pada tahun 2014 sebagai fenomena menuju pemilihan. Berbagai Gerakan bawah tanah muncul sebagai partisipasi public. Kritik muncul karena kemunculan Gerakan memiliki politik identitas masing-masing. Model baru partisipasi politik masyarakat.
9. Penelitian pada tahun 2015 oleh ZamZam Muhammad Fuad, mahasiswa program studi ketahanan nasional, Universitas Gadjah Mada “Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan

Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)” penelitian ini mengkaji tentang salah satu kelompok masyarakat di Banyumas yang melakukan Pendidikan politik serta pemilu yang bernamakan Relawan Demokrasi Banyumas. Anggota yang terdapat pada relawan ini adalah pemilik hak suara pemilihan.

Penelitian ini kurang menjelaskan siapa saja instrument yang ada dalam relawan serta masyarakat mana saja yang diberikan Pendidikan politik serta pemilu.

10. Skripsi pada tahun 2016, oleh Alhafiz Atsari, mahasiswa sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta “proses kandidasi calon perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah kota yogyakarta tahun 2017 (Studi Kasus Gerakan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta)” mengkaji tentang suatu kelompok yang tergabung untuk melakukan proses kandidasi calon perseorangan dalam pilkada di Kota Yogyakarta. Proses perekrutan ini pun melalui berbagai tahap. Berbagai instrument ada dalam kelompok yang dinamakan Joint.

Pembahasan kajian kurang mendasar terkait bagaimana melakukan Pendidikan politik serta pola yang dilakukan Gerakannya.

Dengan demikian, penelitian yang telah banyak dikaji dan dianalisis terkait Gerakan kerelawanan dari sudut pandang pola Gerakan, kemunculan, dan inisiasi secara komprehensif keterlibatan KISP atau pun membawa isu Pendidikan pemilih dengan swadaya dan mandiri cukup jarang dibahas. Hal ini yang membuat penelitian saat ini merupakan penelitian yang berfokuskan hanya pada ruang lingkup Gerakan kerelawanan KISP dalam melakukan Pendidikan pemilih, hal ini dikarenakan bahwa KISP memiliki karakteristik yang unik dalam artian mereka memiliki caranya sendiri dalam melakukan Pendidikan pemilih. Disisi lain dalam penelitian ini tidak terbatas terkait program Pendidikan pemilih yang diberikan, terlebih bagaimana secara

swadaya dan kerelawanannya KISP mampu bertahan dan konsisten dalam menjalankan secara kelembagaan dan Gerakan.

F. Kerangka Teori

Pendekatan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap penggambaran suatu peristiwa, dari bagian mana kita melihatnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan. Maka teori menjadi bagian yang penting untuk mengetahui bagaimana pola Gerakan Komite Independen dalam melakukan Pendidikan pemilih di Provinsi DIY. Pola Gerakan ini tentu akan mempengaruhi sejauh mana efektivitas serta efisiensi Pendidikan pemilih itu dilakukan.

1. Civil Society

Proses keikutsertaan masyarakat sipil dalam negara berpengaruh tinggi dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Politik, kesejahteraan dan *civility* akan datang dan terbentuk dengan sendirinya seiring factor-faktor lain terbangun seperti Lembaga-lembaga dari berbagai latar belakang bergerak dan saling menguatkan sesuai dengan fungsinya. Pada kasus negara-negara dunia ke-3 demokrasi modern, Lembaga-lembaga selalu perlu diketuk agar benar-benar menyuarakan demokrasi. Hal-hal tindakan terkait penyadaran terhadap Lembaga segar sekaliber independent serta adil pun akan terjebak konservatisme. Kasus penyakit demokrasi ini bersumber pada kegagalan dalam mengejawentahkan symbiosis mutualisme antara paradigma demokrasi dan nasionalisme dimana hal itu hanya mungkin dilakukan dengan “konsolidasi kebangsaan” (Cohen, J.L., & Arato, A., 2007)

Mengutip gagasan Gramsci pada Otho (2010) mengartikan *state* dengan *politic society* ditambah *civil society* “*the state should be understood not only as the apparatus of the government, but also the private apparatus of Civil Society*”

(negara tidak harus dipahami hanya sebagai Lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil).

Civil society, dikonsepsikan secara teoritis sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar (Damsar, 2010).

Dalam civil society, individu dan/atau kelompok individu memiliki *self-reliance* (percaya diri). Percaya diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sedangkan *self-supporting* (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh civil society dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya *voluntary* (sukarela). Terakhir, ketataan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan prinsip *civil society* (Damsar, 2010).

Tantangan yang dihadapi oleh negara baru demokrasi membutuhkan dorongan *civil society* yang berimplikasi pada interaksi social-politik-ekonomi secara umum pada bidang-bidang *state society*, *bussines society* dan *civil society*. Ketiga bidang ini selaras dengan tumbuhnya Penguatan nilai demokrasi seperti; partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, ruang publik yang dapat menjamin pengawasan dalam pemerintahan sebagai prasyarat berjalannya proses konsolidasi menuju demokrasi substantive.

Civil society merupakan sebuah ranah masyarakat yang terpisah dengan ranah Negara karena mereka berperan dan memiliki ketetapan yang lebih bebas dan merdeka dari intervensi Negara. Dalam bertindak, kelompok masyarakat ini memiliki kemandirian yang tegas terhadap berbagai kepentingan akan kekuasaan. Yang lebih terpenting dari fungsi *civil society* adalah adanya partisipasi aktif dari semua warga negara, baik yang tergabung dalam berbagai perkumpulan, organisasi atau kelompok lainnya sehingga akan membentuk karakter demokratis di Lembaga tersebut (Nickel, Patricia Mooney, 2015).

Abraham Lincoln berpendapat bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan semua dikembalikan kepada rakyat, rakyat akan mempunyai ruang gerak yang luas untuk memperkuat peranan *civil society*, masyarakat akan merasa aman. Negara tidak akan membuat kebijakan yang sepihak dan semena-mena dan hal inilah yang akan menaikkan *bargaining position* masyarakat dihadapan negara. Ernest Gellner menyatakan “*no civil society, no democracy*” . Dalam penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi, tumbuh subur dan berkembangnya sangat bergantung pada kondisi masyarakat. Semakin demokrasi diakui dan diterapkan disuatu negara, *civil society* semakin memiliki ruang yang luas dan bebas dalam negara tersebut. Namun sebaliknya, jika demokrasi dimaknai sempit dan dibatasi kehendaknya dalam suatu negara, maka konsep sampai kualitas *civil society* patut dipertanyakan dan diragukan.

Menurut Muhammad Soim dalam Sanjaya (2017: 19) terdapat beberapa syarat agar *civil society* dapat terbentuk dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dapat terpenuhi di dalam masyarakat.
2. Terjalannya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok karena modal manusia dan modal sosial berkembang.
3. Dihilangkannya diskriminasi terhadap pelayanan sosial
4. Dimilikinya kemampuan untuk terlibat di dalam berbagai forum dengan tujuan mengembangkan kepentingan bersama dan kebijakan publik.
5. Adanya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan
6. Terwujudnya produktifitas dan keadilan sosial bagi lembaga-lembaga ekonomi, hukum dan sosial.
7. Terjalinya hubungan dan komunikasi antar jaringan-jaringan masyarakat secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Hegel dan Marx dalam (B.Alam, 2014) memperhatikan jalur koordinasi pada negara dan civil society dimaknai sebagai hubungan terarah. Hegel melihat negara sebagai pengontrol civil society, sedangkan Marx melihat negara sebagai perpanjangan kepentingan ekonomi yang menguasai civil society. Berbeda dengan pandangan Hegel dan Marx, Gramsci mengajukan suatu perspektif baru yang melihat hubungan timbal balik yang setara di antarakeduanya. Hal inilah yang membuat pemikiran Gramsci sangat berpengaruh pada berbagai pemikiran-pemikiran sosial masa kini.

Dari tinjauan beberapa pemikiran tentang civil society oleh para ahli ilmu sosial abad ini, jelas terlihat seutas benang merah yang menghubungkan perbedaan-perbedaan mereka, yaitu:

- bahwa civil society mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan
- bahwa civil society merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas.

2. Voluntarisme Politik

Untuk mendefinisikan kerelawanan, terdapat setidaknya 3 kata mendasar, yakni sukarela, altruisme (mementingkan orang lain), dan kerelawanan itu sendiri. Batson (Leventhal, 2009) mendefinisikan altruisme sebagai, “*a motivational state with the ultimate goal of increasing another’s welfare.*” Pendapat kerelawanan dari Leventhal mendasar pada faktor membantu orang lain tanpa maksud untuk memperoleh timbal balik, karena sesuai keinginan dari yang personal. Pilihan (choice) dan keinginan (will) merupakan fondasi dasar kerelawanan. Hal tersebut diperkuat pada pengertian dari Robotham dalam Benson (1980) berpendapat bahwa voluntarisme adalah tindakan yang berdasarkan sifat sosial dan kemasyarakatan, yang dimana pelaku atau aktornya tidak memperoleh upah, imbalan ataupun keuntungan materil. Jadi secara umum voluntarisme sebetulnya bertolak pada prinsip kesukarelaan dalam menolong tanpa harus meminta imbalan materi. Tindakan ini lebih kepada upaya memberi bantuan.

Konsep kerelawanan mengacu pada faktor kebebasan dan deliberative guna melakukan tindakan kepada orang lain dengan waktu yang bertahap. International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional berpendapat bahwa relawan merupakan tiap manusia dalam factor apapun, bekerja tanpa timbal balik,

bertindak aktivitas yang tidak menjadi kewajibannya dalam menghasilkan produk atau jasa; dan bukan domisili yang menetap.

Menurut Verba dalam hasil penelitian oleh Fahrimal Y. dan Muffaruddin (2015) terdapat 3 Model voluntarisme politik dengan menyesuaikan kondisi sosio-ekonomi-status atau SES ;

a. Sumberdaya

Sumberdaya dipahami Verba dalam beberapa aspek, yaitu waktu, uang, dan ketrampilan warga. Sumberdaya menginisiasi terhadap tumbuhnya jiwa sukarela orang terhadap partisipasi politik. Sumber daya secara umum timbul dalam Lembaga sosial, keluarga, sekolah, pekerjaan, dan Lembaga keagamaan. Pengaruh dari Lembaga sosial seharusnya mempengaruhi terhadap persediaan waktu, ketrampilan, dan uang. Demikianlah pilihan hidup dan kondisi pasar dapat mempengaruhi kondisi pola aktivitas politik. Sumber daya waktu sangat terbatas dan tidak berhubungan dengan Ras, tingkat pekerjaan ataupun jenis kelamin. Kenyataan hidup penentu bagi waktu luang. Beberapa orang mungkin berpikir untuk memiliki pekerjaan, memiliki anak-anak dan memiliki pasangan yang bekerja.

Di sisi uang, sangatlah berpengaruh pada tingkat Pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial. Bagaimana uang menjadi vital dalam kelas sosial individu maupun kelompok.

Ketrampilan merupakan kelebihan individu guna mengelola waktu dan uang secara efektif dalam kehidupan berpolitik. Dalam pengertian ini tidak sebatas dalam organisasi, namun juga pada ranah Pendidikan.

b. Keterlibatan

Keterlibatan merupakan sebuah istilah yang dikemukakan dengan memberi gambaran berbagai kecenderungan psikologis warga. Kecenderungan psikologis ini terkait kepentingan politik, kepercayaan politik, harga diri, identifikasi partai politik, komitmen untuk kebijakan politik, dan kepuasan psikis individu-individu sebagai akibat dari terlaksananya kewajiban-kewajiban (Maan, 2011: 19).

Konsep keterlibatan memiliki konsekuensi pengertian yang tinggi, dimana harus hati-hati dalam memaknainya. Ketertarikan warga bisa saja meningkatkan kemungkinan partisipasi, demikian pula bahwa partisipasi akan meningkatkan keterlibatan dengan membuat orang tertarik untuk mencari lebih banyak informasi. keterlibatan. Namun, waktu, uang, dan ketrampilan tidak akan berarti tanpa keterlibatan, Keterlibatan diyakini sebagai motivasi yang mengarahkan mengapa orang seperti mau dan tidak mau berpartisipasi. Konsep ini disebut sebagai 'stimulus internal' yang membuat masyarakat peduli terhadap politik dan isu-isu publik serta mengerti bahwa mereka memiliki suara.

c. Rekrutmen

Rekrutmen warga dalam politik terkadang dilakukan secara resmi, tetapi lebih sering permintaan partisipasi berasal dari hubungan orang-orang dalam lingkungan kerja, organisasi atau komunitas pada individu yang terlibat. Rekrutmen individu untuk berpartisipasi dalam politik terkadang juga dilakukan dengan menyandarkan pada kepentingan organisasi dimana orang tersebut masuk di dalamnya.

Konsep kerelawanan yang bergerak dalam ranah sosial hari ini bergeser dan berkembang ke dalam dunia politik. Hal ini bertolak belakang dan suatu tampanan keras untuk partai politik. Pengertian tersebut selanjutnya di pertegas kembali oleh Arianto (2014) yang menyebutkan bahwa relawan politik dalam konteks ini

tidak masuk dalam kategori sebagai partisipasi yang dimobilisasi, sebab partisipasi yang lahir adalah partisipatif sukarela (otonomi).

3. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Mengutip dalam Budimansyah, D dan Suryadi, K (2008:2) menafsirkan “*Civics*” adalah the Science of citizenship atau Ilmu Kewarganegaraan yang berarti suatu ilmu hubungan antara individu dan individu kepada Negara. Individu yang dimaksud dalam hal ini merupakan warga negara yang mempelajari terkait negaranya. Dalam definisi lain, David Kerr mengartikan citizenship education yaitu “*proces to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizen and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.*”. Makna dari artian bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara khusus penting bagi menyiapkan generasi mudanya pada hak-hak, peran maupun tanggungjawabnya sebagai warga negara (Winarno, 2013: 5).

Menurut Nu'man Soemantri (2001:54) Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mahoney dalam Budimansyah, D dan Surayadi K. (2008) menjelaskan Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses pembelajaran semua mata

pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik.

1.) Cakupan Pendidikan Kewarganegaraan

Azyumardi Azra dalam Darmadi (24:2010) Rumusan Civic Education mencakup;

- a. Pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya
- b. Pemahaman tentang “rule of law” dan Hak Asasi Manusia seperti tercermin dalam rumusan-rumusan perjanjian dan kesepakatan internasional dan local
- c. Penguatan ketrampilan partisipasi yang akan memperdayakan peserta didik untuk merespons dan memecahkan masalah-masalah masyarakat secara demokratis.
- d. Pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang harus diaplikasikan ke semua warga negara sebagai acuan peningkatan kualitas warga negara yang demokratis yaitu bertujuan mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), berfungsi dalam membina warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab (*civic responsibility*) serta berguna untuk mengarahkan warga negara untuk ikut andil aktif dalam berbagai kegiatan (*civic participation*). Tiga kompetensi warga negara tersebut dianggap sejalan dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Winarno, 2013: 19). Uraian tersebut menggambarkan bahwa PKn memiliki fungsi

sebagai wahana dalam membina warga negara yang mampu memiliki tanggung jawab, partisipasi aktif dan cerdas dalam memberikan kritik dan masukan pada para penyelenggara negara sebagai upaya membangun kontrol sehingga ada keseimbangan.

4. Pendidikan Pemilih

1. Pengertian Pendidikan Pemilih

Pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai atau norma tertentu terhadap generasi untuk membentuk karakter dan sikap. Nilai-nilai menjadi dasar bagaimana cara sumber inspirasi dalam melihat serta menghadapi suatu hal.

Pendidikan dalam hal penyelenggaraan pemilu adalah Pendidikan sebagai penanaman nilai tentang pemilu serta demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilih dimaknai sebagai warganegara yang mencapai umur 17 tahun dan atau telah menikah serta sebagai warga negara Indonesia sebagai syarat untuk memilih (Purwaningsih, 2019).

Mengutip Joko J. Prihatmoko (2005:46), pemilih didefinisikan sebagai seluruh pelaku yang menjadi target utama para partisipan kepada para pemilik suara dengan tujuan mempengaruhi untuk memilih mereka serta mendukung kepada partisipan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

Kenneth D Wolhack dalam Rozuli A Imron dan M. Habbodin (2018;132) menjelaskan Pendidikan pemilih merupakan: menjadikan warganegara memahami arti penting pemberian suara, mengerti hak pilih mengetahui prosedur pemberian suara dan memiliki pemahaman yang membuat tahapan-tahapan politik.

Berkenaan dengan peraturan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] No. 10/2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dimaknai dengan pengertian yang

lebih komprehensif, *pendidikan pemilih sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilihan tentang pemilu*. Semua resolusi pengertian tersebut memiliki kesimpulan, yaitu pengertian pendidikan pemilih semata-mata berkaitan dengan pemberian hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Warga masyarakat diberikan pengetahuan dan Memahami pemilihan, prosedur, dan tatacara memberikan suara. Ada kesan kuat dalam Pendidikan pemilihan berlangsung monolog dan membosankan.

2. Bentuk Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih adalah suatu ilmu yang memberikan informasi kepada masyarakat sebagai usaha meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terkait pemilu. Sebagai salah satu bentuk pendidikan, maka pendidikan pemilih setidaknya merupakan suatu upaya sistematis, massif dalam memberdayakan pemilih. Maka dari itu, pendidikan pemilih tidak sebatas bagaimana peserta didik dapat menjalankan hak pilihnya secara benar dan mengerti teknis pemilihan. Pendidikan pemilih bertujuan jauh dari sekadar itu. Ia harus direncanakan secara terperinci, sistematis dan terprogram dengan pilihan-pilihan materi yang berdayaguna, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Merujuk pada buku Pedoman Pendidikan Pemilih (2019) oleh Rumah Pintar Pemilu, terdapat 5 (lima) bentuk atau strategi bagaimana Pendidikan pemilih mencapai tujuan :

1.) Penggunaan Teknologi Informasi

Keterbukaan informasi di era sekarang, mempermudah masyarakat mendapat serta mengakses kebutuhan informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun. Seiring meningkatnya kebutuhan informasi pada masyarakat, diiringi juga

berkembangnya teknologi informasi. Kondisi berkembangnya teknologi informasi tersebut perlu direspon guna Pendidikan pemilih.

2.) Pemanfaatan Media Massa

Keberadaan media yang konvensional kiranya masih sangat masif di tengah hiruk pikuk berbagai bentuk media saat ini. Media massa terdapat dua macam, yaitu media cetak serta elektronik.

3.) Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan menjadi tempat strategis guna melakukan Pendidikan pemilih. Beberapa factor mempengaruhi bagaimana Lembaga Pendidikan baik, seperti keberadaannya yang menyebar di lingkungan masyarakat, objek pemilih yang solid untuk pemilih, dan kuantitas pemilih yang besar.

4.) Pemanfaatan Aktifitas Sosial Budaya

Lingkungan pada masyarakat Indonesia sangat identic dengan budaya lokalnya. Masyarakat memiliki daya partisipasi tinggi dalam kegiatan sosial budaya dan mendapat perhatian dari publik. Bentuk aktivitas budaya diantara masyarakat bermacam, seperti kegiatan kepemudaan, merti desa, rembug desa, PKK, keagamaan, dan lain-lain.

5.) Komunitas Hobby

Karakteristik dari orang dalam komunitas hobby salah satunya adalah a-politis, atau kebanyakan mereka alergi terhadap politik. Tidak mudah melakukan pendekatan kepada kelompok sosial ini. Namun dengan pendekatan yang tepat, percepatan Pendidikan pemilih individu ke individu akan cepat, karena kelebihan dari komunitas hobby adalah mereka memiliki ikatan yang kuat antar anggotanya.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi dari konsep-konsep yang dipakai dan menjadi pokok perhatian pada penelitian, yang dimaksudkan sebagai gambaran, guna menghindari kesalah pemahaman terhadap pengertian konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian dan untuk mengetahui batasan tentang istilah yang ada dalam pokok bahasan. Adapun batas bahasan pengertian konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Civil Society

Civil Society merupakan suatu tatanan masyarakat, baik individu maupun kelompok beradab yang bebas dan terbuka dalam arti tidak bergantung pada sector negara dan pasar untuk melakukan aktivitas kehidupan bermasyarakat (sosial, budaya, politik, dan agama).

2. Voluntarisme Politik

Voluntarisme politik merupakan suatu tindakan atas permasalahan sosial yang bergerak dengan berdasarkan kepedulian dan kesadaran diri tanpa paksaan pihak lain serta tanpa menginginkan atau mendapat timbal balik demi kemaslahatan umat.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu yang menjelaskan serta mempelajari nilai-nilai demokrasi, bagaimana menjadi warga negara yang berpikir kritis, analitis, serta demokratis sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila.

4. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih merupakan ilmu yang menjelaskan serta mempelajari nilai terkait pemilu dan demokrasi yang tidak serta-merta terbatas pada tata cara teknis pemilihan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan tahapan untuk menjelaskan satu konsep yang terstruktur menjadi kalimat yang digunakan untuk menggambarkan tatanan dan karakter dari focus penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk

memperjelas konsep-konsep dari pergerakan yang dilakukan oleh KISP dalam melakukan Pendidikan pemilih di Provinsi DIY, antara lain :

1. Kerelawanan KISP dalam Pendidikan pemilih

a. Sumberdaya

Adanya sumber daya secara mandiri, seperti uang, waktu, dan ketrampilan individu.

b. Keterlibatan

Adanya partisipasi sebagai kepentingan politik, kepercayaan politik, harga diri, identifikasi partai politik, komitmen untuk kebijakan politik, dan kepuasan psikis individu-individu.

c. Rekrutmen.

Adanya rekrutmen secara resmi baik rekrutmen langsung maupun permintaan partisipasi berasal dari hubungan orang-orang dalam lingkungan kerja, organisasi atau komunitas pada individu yang terlibat.

I. Metode Penelitian

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah yang terjadi yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dengan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006:11).

Metode penelitian deskriptif memiliki rumusan yang baik yang nantinya dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian. Berdasar dari kesimpulan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan. Peneliti akan mencoba menjelaskan terkait pola gerakan serta bentuk dalam Pendidikan pemilih yang dilakukan KISP.

4. Unit Analisis

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor KISP yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisa data pada penelitian ini adalah KISP seperti koordinator, Divisi Pendidikan pemilih, Sekretaris, Bendahara, dan juru bicara serta anggota yang terlibat langsung di lapangan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung berdasarkan rencana awal informan di dalam penelitian ini. Informan dari penelitian ini adalah koordinator, Divisi Pendidikan pemilih, Sekretaris, Bendahara, dan juru bicara serta anggota yang terlibat langsung di lapangan.

Yang terdapat pada tabel :

Tabel 1.1

Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data
1	Sejarah terbentuknya KISP	Koordinator KISP

2	Program KISP dalam melakukan Pendidikan pemilih	Koordinator dan Divisi Pendidikan Pemilih KISP
3	Kendala KISP dalam melakukan Pendidikan pemilih	Koordinator dan Divisi Pendidikan Pemilih,
4	Kerjasama KISP dalam melakukan Pendidikan pemilih	Koordinator KISP
5	Sumber pendanaan KISP dalam melakukan Pendidikan pemilih	Koordinator dan Bendahara KISP

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder berguna untuk menguatkan data primer yang telah diperoleh sebelumnya.

Adapun data sekunder untuk penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Sekunder

No.	Data Sekunder	Sumber Data
1	Landasan Hukum KISP	KISP
2	Laporan Kegiatan KISP	KISP
3	Berita Kegiatan KISP	KISP dan Media

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan mencari bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Berikut data wawancara yang akan dilakukan :

Tabel 1.3
Wawancara

No.	Narasumber	Jumlah
1	Koordinator KISP	1 Orang
2	Sekretaris KISP	1 Orang
3	Bendahara KISP	1 Orang
4	Divisi Pendidikan Pemilih KISP	2 Orang

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:264-252) adapun model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang didapat dari narasumber kurang setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti

akan mengajukan pertanyaan pertanyaan lagi sampai mendapatkan suatu informasi yang dianggap kredibel. Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan.

Akifitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilah hal-hal yang dianggap penting, memfokuskan pada satu tujuan, mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat. Bagan, hubungan antara kategori flowhert dan sejenisnya. Dengan display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang sedang dipahami tersebut.

c. Verification (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan awal didukung dengan data yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka pengumpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Pariwisata et al, 2012)

J. Sistematika Penulisan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla purus eros, eleifend ut congue mollis, mattis id justo. Nam malesuada, diam eget varius gravida, augue libero sagittis odio, at tristique enim nisi eu nibh. Integer sollicitudin cursus volutpat. Suspendisse tempus, metus quis scelerisque auctor, libero justo laoreet leo, ac iaculis augue turpis vel nibh. Praesent ultrices tincidunt arcu vel volutpat.